Prapembinaan Informasi Geospasial di Universitas Siliwangi

Foto Bersama

Amanah pembinaan yang diberikan kepada Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) terus menerus ditunaikan dan dilaksanakan. Salah satu bentuknya adalah rencana pembinaan informasi geospasial bagi mahasiswa dan dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Tim Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) khususnya Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial melakukan kunjungan kerja ke pendidikan tinggi negeri yang berada di jantung kota Tasikmalaya ini dalam rangka prapembinaan. Kunjungan kerja dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019, diterima langsung oleh Kepala Prodi Pendidikan Geografi, Dr. Iman Hilman, didampingi 6 dosen dari prodi yang sama.

Kaprodi Pendidikan Geografi dengan tangan terbuka menerima dengan baik rencana PPTRA melakukan pembinaan geospasial. Hal ini karena sejalan dengan program literasi nasional yang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu aspek literasi yang harus ditanamkan kepada mahasiswa Pendidikan Geografi adalah literasi Informasi Geospasial (IG). IG sangat vital karena menjadi satu bagian dari 3 pendekatan keilmuan geografi yaitu keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan harus didukung oleh pemahaman IG yang optimal, baik dari sisi konsep maupun teknisnya. Dalam konteks inilah, IGT hadir untuk memberikan pemahaman keruangan kepada para mahasiswa yang rencananya akan berlangsung pada bulan November 2019.

Di penghujung kunjungan kerja, Tim PPTRA diajak untuk melihat Laboratorium Pendidikan Geografi. Tampak di salah satu bagian dinding terpampang Peta NKRI skala 1:2.500.000. Kaprodi mengatakan bahwa peta ini terpasang di bagian yang strategis dengan harapan menjadi bagian literasi wawasan nusantara sehari-hari bagi mahasiswa yang melakukan praktik. Sebagai catatan, Peta NKRI tersebut merupakan pemberian PPTRA BIG pada tahun 2015 saat Tim PPTRA melakukan survei lapangan di wilayah Priangan Timur. **[Fakhruddin Mustofa, 2019]**

Progres Asistensi Tata Ruang

Tabel Jumlah Rekomendasi Peta RTR Periode Januari - Oktober 2019

Nama Provinsi	RDTR	RTRW Kab/Kota	RTRW Prov	KSP	Total
Bali	1	3	0	0	4
Aceh	1	0	0	0	1
Jambi	0	2	0	0	2
Jawa Timur	7	10	0	0	17
Jawa Tengah	0	9	0	0	9
Jawa Barat	0	4	0	0	4
Banten	0	3	0	2	5
DIY	0	2	0	0	2
Sumatera Barat	1	4	0	0	5
Kalimantan Tengah	0	6	0	0	6
Kalimantan Barat	2	0	0	0	2
Kalimantan Selatan	0	1	0	0	1
Riau	0	2	0	0	2
Kepulauan Riau	0	2	0	0	2
Sumatera Selatan	0	2	0	0	2
Sumatera Utara	0	2	0	0	2
Lampung	0	3	0	0	3
NTB	1	0	0	0	1
NTT	0	0	1	0	1
Maluku Utara	2	0	0	0	2
Gorontalo	0	1	0	0	1
Sulawesi Barat	1	0	0	0	1
Sulawesi Tenggara	0	2	0	0	2
Sulawesi Utara	0	1	0	0	1
Papua	1	1	0	0	2
Jumlah	17	60	1	2	80

Tabel Jumlah Asistensi dan Supervisi Periode Januari - Oktober 2019

Peta RTR	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Total
RTRW Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS Nasional	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1	9
RTRW Provinsi	0	0	1	3	1	3	4	2	2	1	17
KS Provinsi	5	1	3	8	5	6	2	5	8	5	48
RTRW Kab/Kota	30	35	40	46	30	38	63	58	62	61	463
KS Kab/Kota	8	1	1	2	4	2	3	1	2	3	27
RDTR	54	57	72	53	60	23	73	111	60	120	683
Jumlah	98	94	118	112	101	72	146	177	138	191	1247

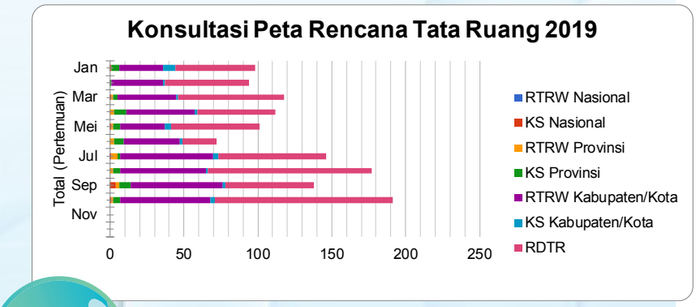

80 Rekomendasi

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.ptra@gmail.com
Twitter: @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/

EDISI OKTOBER 2019

TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

Catatan Beranda

Mens sana in corpore sano, adalah sebuah kutipan yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kutipan inilah yang barangkali tepat menggambarkan potret kegiatan selama bulan oktober di PPTRA, karena banyaknya aktivitas olahraga dalam rangka memeriahkan Hari Informasi Geospasial (HIG) ke 50. Puncaknya adalah olahraga lari dalam acara *The Royal Geospasial Sanddune Run* di Parangtritis, Yogjakarta. Sebuah *event* lari maraton 6 Km dan 10 Km yang diikuti oleh berbagai komunitas. Berolahraga itu penting untuk kesehatan, namun sering diabaikan banyak orang termasuk sebagian pegawai BIG. Barangkali banyaknya kasus-kasus penurunan kesehatan pegawai BIG, karena jarang berolahraga. Ini seharusnya menjadi catatan pimpinan bahwa fasilitas olahraga dan *event* olahraga harus disiapkan untuk pegawai, agar karyawan bisa hidup sehat, jiwanya kuat sehingga menghasilkan program dan inovasi yang sehat.

Bulan oktober juga bulan barokah, karena bulan ini alhamdulillah kembali PPTRA menerima penghargaan sebagai unit dengan nilai *Self Assessment Maturitas* SPIP terbaik 2018. Tahun sebelumnya kami menerima penghargaan sebagai unit yang anti gratifikasi. Tentu penghargaan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil proses panjang dan kerja keras semua pegawai di PPTRA. Penghargaan tersebut tentu menyenangkan bagi unit yang menerimanya dan tentu akan lebih menyenangkan bila setiap penghargaan disertai pula dengan insentif dan disintensif bagi yang dianggap kurang dalam penilaian.

Meski disibukkan dengan olahraga, kinerja tim teknis PPTRA tidak menurun. Terbukti hampir tiap minggu kami mengadakan pleno pemberian tata ruang dan selama oktober sudah lebih dari 40 peta tata ruang kami keluarkan rekomendasinya. Demikian pula inovasi Peta NKRI terbalik (*upside down*) yang dikeluarkan Bidang Atlas sempat menarik perhatian dan diskusi panjang, karena memang agak unik membuat peta Indonesia dengan proyeksi terbalik. Selanjutnya neraca sempat disinggung dalam rapim di Yogjakarta oleh Kepala BIG. Bahwa penyusunan neraca sumberdaya alam penting. Termasuk mengejar penerbitan *Newsletter* ini sebagai bagian dari pelaporan potret kegiatan PPTRA kepada publik. Selamat membaca **[Mulyanto Darmawan, 2019]**

PPTRA di Acara HUT Puncak HIG
The Royal Geospasial Sanddune Run 2019

Kebijakan & Isu Strategis

Online Single Subsomission (OSS) atau dikenal dengan istilah Perijinan Berusaha Secara Elektronik merupakan suatu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa daerah yang memiliki investasi tinggi perlu mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka OSS tersebut. Dalam Pasal 44 Ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang belum memiliki RDTR maka harus menyusun RDTR nya untuk kawasan industri dan kawasan usaha, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak PP ini ditetapkan. Untuk itu maka pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi urusan penataan ruang harus memberikan bantuan teknis, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat 2.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendata setidaknya terdapat 158 kabupaten/kota di Indonesia yang diprioritaskan penyelesaian RDTR nya karena memiliki potensi ekonomi. Dari jumlah tersebut ditetapkan 57 daerah yang diberikan bantuan teknis oleh Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Waktu penyelesaian bantuan teknis tersebut adalah paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya PP No 24 tahun 2018. Padahal menurut Permen ATR No 16 tahun 2018, secara teknis penyusunan RDTR akan memerlukan waktu 12 bulan. Hal ini karena selain penyusunan substansi, maka juga mencakup validasi kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, serta mencakup verifikasi peta. Dua tahapan ini secara teknis memang membutuhkan waktu cukup lama. Untuk itu perlu ada koordinasi antara kementerian lembaga yang terlibat agar penyelesaian RDTR OSS ini dapat berjalan baik.

Dalam aspek perpetaan, maka BIG bertugas melakukan percepatan penyelesaian peta RDTR nya. Langkah pertama yang dilakukan pada rapat koordinasi RDTR OSS dengan kementerian dan lembaga adalah mendata status dan kondisi data di 57 RDTR tersebut. Hasil pendataan secara lengkap kondisi data dan peta RDTR di 57 wilayah OSS tersebut kemudian dibagi dalam 4 cluster untuk memudahkan percepatan penyelesaiannya. Masing-masing cluster berbeda tingkat permasalahannya.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan asistensi dan supervisi peta terhadap 57 RDTR OSS ini dengan status kondisi yang berbeda-beda, dan dalam jangka waktu hanya 6 bulan? Maka upaya terobosan dalam melaksanakan asistensi dan supervisi harus dilakukan di BIG, khusus dalam menangani 57 RDTR OSS ini. Asistensi dan supervisi yang dilakukan adalah dengan model klinik intensif. Hingga saat ini klinik-klinik dalam rangka penyelesaian peta RDTR OSS masih berjalan dan menunjukkan kecenderungan positif untuk dapat selesai tepat waktu. **[Ryan Pribadi, 2019]**

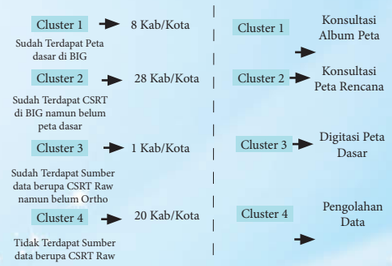

REDAKSI:
| **Penanggung Jawab :** Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi:** Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| **Editor:** Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| **Desain Tata Letak:** Ika Rosalika |

Potret Kegiatan

ATLAS DAN CITA-CITA ANAK NEGERI

Atlas bagi seorang siswa dapat membangkitkan cita-cita. Seorang anak kecil yang tinggal di lereng gunung yang sama sekali tidak memiliki bayangan tentang sumber daya ikan di laut dapat bercita-cita menjadi seorang ahli perikanan laut karena membaca altas. Potongan kisah ini menjadi kalimat pembuka salah seorang narasumber saat memberikan masukan dalam acara *focus group discussion* (FGD) pada tanggal 21 Oktober 2019 di Hotel Renotel Olympic, Sentul, Bogor. Dr. Khairul Amri, seorang ahli dari Balai Riset Perikanan Laut – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengisahkan titik balik dalam hidupnya sehingga dia menjadi seperti sekarang bermula saat dia membaca atlas yang menceritakan sumber daya ikan di laut. Gambar-gambar ikan dan tempat-tempat pelelangan ikan yang disajikan dalam atlas begitu menginspirasinya sehingga membuat dia memutuskan untuk "turun gunung".

Suasana FGD

Kegiatan FGD yang bertujuan menjaring masukan terhadap draf atlas ini juga menghadirkan para ahli dari Badan Geologi, Pusat Penelitian Biologi – LIPI, dan Departemen Sejarah – Universitas Indonesia. Kegiatan FGD berlangsung selama dua hari pada tanggal 21-22 Oktober 2019. Pada hari pertama, diskusi difokuskan pada tema terkait fisik, sedangkan pada hari kedua fokus diskusi diarahkan pada tema terkait sejarah dan budaya. Ahli dari berbagai bidang keahlian diundang karena isi altas yang sedang disusun ini akan merangkum berbagai tema, baik terkait fisik maupun budaya. Tema-tema tersebut mengacu pada kurikulum pendidikan setingkat SMA tahun 2013.

Dengan judul "Atlas Indonesia dan Dunia untuk SMA Sederajat", atlas ini diharapkan berfungsi sebagai suplemen bahan ajar geografi. Para narasumber dan seluruh tim teknis penyusun atlas menaruh harapan besar agar kelak atlas ini dapat menginspirasi dan membangkitkan cita-cita para siswa di seluruh penjuru negeri untuk menjadi seorang ahli di bidang tertentu. **[Randhi Atiqi, 2019]**

FGD Regional 3 Kegiatan Peta Rencana Tata Ruang Terekomendasi

Dalam rangka membantu percepatan penyusunan peta rencana tata ruang dalam hal ini RDTR, pada tahun 2019 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial kembali melakukan kegiatan bantuan teknis untuk percepatan penyusunan peta rencana detail tata ruang yang terdiri dari 150 BWP dari seluruh Indonesia. Kegiatan FGD tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 8-11 Oktober 2019 di Bali, ditujukan untuk wilayah Regional 3, sebagai bagian dari **Kegiatan Peta Rencana Tata Ruang Terekomendasi.**

Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG, Antonius Bambang Wijanarto, yang membuka sekaligus memberikan arahan. Dalam sambutannya, Deputi Bidang IGT, BIG menyampaikan apresiasi untuk kegiatan bantuan teknis ini karena tingginya kehadiran dan keaktifan peserta. Harapannya kegiatan dan semangat seperti ini terus meningkat seiring dengan dinamika percepatan penyusunan peta tata ruang. Antonius menyampaikan bahwa untuk tata ruang sudah perlu lompatan panjang, bukan lagi percepatan.

Foto Bersama

Pada sesi diskusi panel dihadiri oleh para narasumber yang berasal dari Kementerian ATR/BPN, BIG dan Kemendagri. Untuk tema tata cara mekanisme persetujuan subtansi dibawakan oleh perwakilan Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, yaitu Zikky Ardiansyah. Dalam pemaparannya Zikky menyatakan bahwa proses persub ini juga harus paralel dengan penyusunan petanya. Sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi antara ATR dan BIG dalam melakukan pembinaan. Dari Kemendagri memaparkan terkait Tata Cara Evaluasi Dokumen Rencana tata Ruang. Untuk pemaparan dari BIG dibawakan oleh Mulyanto Darmawan, selaku Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang yang menyampaikan progres pekerjaan bantuan teknis serta status tata ruang terkini.

Kegiatan dilanjutkan berupa proses klinik asistensi dan supervisi. Tim teknis melakukan pendampingan terhadap pemda, salah satunya mengkonfirmasi peta tematik serta sinkronisasi data rencana. Pada FGD ini dihadiri oleh tim teknis dari pemda penyusun RDTR di Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah FGD 3 yang akan dilaksanakan pada bulan desember awal sebelum dilaksanakan pleno pemberian rekomendasi secara massal. **[Chintia Dewi, 2019]**

PPTRA Laksanakan FGD Pemetaan Integrasi Neraca Spasial Sumberdaya Alam Wilayah Sungai Bengawan Solo

Foto Bersama

Bengawan Solo memiliki panjang kurang lebih 548 km. Ukuran ini menjadikan Bengawan Solo sungai terpanjang di Pulau Jawa. Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo mengalir dari hulu di Pegunungan Sewu di Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) hingga bermuara di Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk disekitar Bengawan Solo maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan air, padahal jumlah air yang tersedia jumlahnya tetap, bahkan relatif menurun. Hal ini disinyalir akibat WS Bengawan Solo mengalami perubahan fungsi, status serta peruntukannya. Saat ini, kondisi Bengawan Solo merupakan salah satu dari 15 DAS Prioritas Nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu langkah yang dilakukan adalah menyajikan kondisi sumberdaya alam di Wilayah Sungai Bengawan Solo secara spasial.

Terkait hal tersebut BIG khususnya Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) turut serta aktif dalam penyajian spasial sumberdaya alam WS Bengawan Solo. Untuk itulah kegiatan pemetaan integrasi neraca spasial sumberdaya alam WS Bengawan Solo ini dilakukan pada tahun 2019 di Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (PDS). Salah satu langkah dalam memantau progres pekerjaan maka pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, PPTRA melaksanakan FGD Pemetaan Integrasi Neraca Spasial Sumberdaya Alam WS Bengawan Solo di Hotel Alana, Solo.

FGD secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, Diah Retno Minarni, S.Si., M.Si, dihadiri perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, serta Bappeda setempat. FGD ini bertujuan untuk menyampaikan progres pekerjaan kepada pemangku kepentingan serta pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk kedalam WS Bengawan Solo. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu menghitung neraca lahan, air, hutan dan mineral batubara, melakukan proyeksi, melakukan pengecekan kesesuaian dengan RTRW yang telah disusun pemerintah daerah serta melakukan kajian daya dukung daya tampung.

Selain itu, acara ilmiah ini juga bertujuan untuk menerima saran dan masukan dari peserta FGD terkait teknis pekerjaan. Saran serta masukan yang diberikan berupa ketersediaan data yang dimiliki instansi-instansi tersebut yang dapat membantu memperkaya hasil kajian di Wilayah Sungai Bengawan Solo ini. **[Dinar Farahiyah Rahmah, 2019]**

Rapat Pleno Rekomendasi Peta RTRW

Foto Bersama

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas pada hari Jumat, 11 Oktober 2019 kembali melaksanakan Rapat Pleno Pemberian Rekomendasi Persetujuan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah. Kegiatan ini berlangsung seharian penuh untuk menindaklanjuti beberapa hasil kegiatan Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (RTR) Terekomendasi Paket 2 tahun 2019. Kegiatan ini dalam rangka percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan Peta RTR wajib dikonsultasikan oleh penyusun ke BIG, sehingga asistensi dan supervisi Peta RTR menjadi suatu kewajiban bagi daerah. Asistensi dan supervisi merupakan aktivitas pemeriksaan peta oleh tim teknis, sedangkan rapat pleno merupakan sidang terbuka yang dihadiri oleh tim penguji dari luar Pusat PTRA.

Rapat pleno merupakan rangkaian akhir dari proses asistensi dan supervisi Peta RTR yang disusun pemerintah daerah. Setelah menyelesaikan tahapan pelaksanaan asistensi dan supervisi, kemudian diusulkan untuk pemberian persetujuan peta RTR-nya. Pada rapat pleno dilakukan proses uji petik peta untuk melihat kesesuaian Peta RTR yang dihasilkan dengan standar penyusunannya. Aspek uji petik dalam rapat pleno mencakup geometris, kelengkapan tematik dan perencanaan serta kartografis Peta RTR.

Rapat pleno dilakukan secara bersamaan untuk 11 Peta RTRW bertempat di Hotel Royal Padjadjaran Bogor. Pleno dihadiri oleh 11 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 7 provinsi. Peta RTRW yang dibahas dalam pleno ini adalah RTRW Kota Pariaman dan RTRW Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat), RTRW Kabupaten Sragen dan RTRW Kabupaten Cilacap (Provinsi Jawa Tengah), RTRW Kota Mojokerto dan RTRW Kabupaten Lumajang (Provinsi Jawa Timur), RTRW Kota Denpasar dan RTRW Kabupaten Karangasem (Provinsi Bali), RTRW Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung), RTRW Kabupaten Serdang Bedagai (Provinsi Sumatera Utara) dan RTRW Kabupaten Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan).

Pelaksanaan pleno menghadirkan tim penguji dari luar Pusat PTRA yaitu peneliti utama dari Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama - BIG, antara lain Dr. Priyadi Kardono, Dr. Bambang Riadi, Ir. Yatin Suwano, MSc dan Danang Budi Susteyo, ST. Penguji internal dari PPTRA adalah Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, Ryan Pribadi, ST. Kepala PPTRA, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc, dalam arahannya mengharapkan agar Peta RTRW yang disusun oleh pemerintah daerah dapat menyiapkan perencanaan pemanfaatan ruang yang lebih baik dengan memperhatikan aspek kualitas lingkungan hidup, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menarik investasi ke wilayahnya. Kesebelas Peta RTRW yang diplenokan hari ini merupakan bagian dari target 100 RTRW terekomendasi pada tahun 2019. Berdasarkan hasil kesepakatan penilaian antara Kepala Pusat PTRA dan tim penguji, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diuji pada sidang rapat pleno kali ini seluruhnya mendapatkan rekomendasi. **[Izzuddin Abdul Aziz, 2019]**

Workshop Utilization of Japanese Earth Observation Sattelite Imageries

Rabu, 30 Oktober 2019, LAPAN bekerjasama dengan PASCO Jepang mengadakan Workshop dengan tema ***"Utilization Of Japanese Earth Observation Satelite Imageries"*** dengan kegiatan utama pengenalan dan *sharing trend* terkini pemanfaatan citra satelit dari Jepang yaitu ALOS-2, ALOS-3, ASNARO-1, dan ASNARO-2. Citra satelit yang dihasilkan dari PASCO Jepang ini menggunakan 2 sensor yaitu sensor SAR dan sensor optik. Produk ini bermanfaat untuk pengembangan informasi geospasial antara lain untuk mengidentifikasi bangunan dan sebarannya, pemetaan rawan bencana, pemetaan sumberdaya air, identifikasi lahan sawah, klasifikasi hutan, identifikasi bahaya longsor, identifikasi erosi dan manajemen pelabuhan, serta beberapa pemanfaatan lain.

Untuk satelit dengan sensor optik terdiri dari ALOS-3 yang memiliki resolusi hingga 80 cm dan ASNARO-1 yang memiliki resolusi citra hingga 50 cm, sedangkan satelit dengan sensor SAR terdiri dari ALOS-2 (L-Band) yang memiliki resolusi citra 1 m dan ASNARO-2 (X band) yang memiliki resolusi citra hingga 1 m. Saat ini Jepang sedang mengembangkan Satelit ALOS-4 (L-SAR) dan rencananya akan diluncurkan pada tahun 2020 mendatang. ALOS-4 membawa misi 1) Pemantauan terhadap kejadian deformasi dan penurunan muka tanah dengan menggunakan InSAR, 2) melanjutkan dan meningkatkan misi satelit ALOS-2, 3) mencoba beberapa aplikasi baru untuk pemantauan infrastruktur secara *time series*, dan 4) pemantauan laut menggunakan SAR dan sistem identifikasi otomatis untuk kapal.

Foto Bersama

Hingga saat ini, produk citra satelit dari PASCO Jepang sudah banyak digunakan oleh beberapa Kementerian/ Lembaga di Indonesia untuk membantu pekerjaan pemetaan dalam instansi tersebut. Salah satunya adalah Kementerian Pertanian yang menggunakan data citra satelit dari PASCO Jepang untuk pemetaan dan monitoring pola tanam padi, jagung, dan tanaman tebu di Indonesia. Kedepan, PASCO Jepang berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga lain yang ada di Indonesia, khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan *remote sensing*. **[Gin Gin, 2019]**

RESENSI Buku

REFORMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Sebagai pengantar, penulis dalam bukunya menyampaikan bahwa reformasi pengelolaan sumber daya air merupakan sebuah upaya meluruskan atau mengoreksi filosofi, arah, pendekatan, metode, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, baik dari sisi konservasi, pendayagunaan, maupun pengendalian kerusakan. Penulis juga mengingatkan jika pengelolaan sumberdaya air tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, dimana hal itu berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan serta dapat berdampak negatif dan destruktif.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan perubahan paradigma dengan adanya degradasi-degradasi dalam *water culture*. Beberapa degradasi tersebut meliputi: degradasi budaya leluhur tentang air, budaya mengurus sampah dan air, kesadaran budaya ekologi dan morfologi sungai, budaya membuat dan memelihara sumber air danau, budaya memanen air hujan, serta degradasi antisipasi perubahan iklim. Selain itu juga disampaikan terkait mata rantai kerusakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air.

Pembahasan inti dalam buku ini mengemukakan 12 bidang yang perlu direformasi dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu reformasi konsep pengelolaan DAS; konsep pengelolaan sungai; konsep drainase menjadi ekodrainase; konsep pengelolaan danau, situ, dan telaga; konsep pengelolaan daerah pantai dan *estuari*; konsep memanen air hujan; konsep membangun kota sebagai DAS; konsep *Nawa Gatra* dan budaya ramah air; reformasi mengembalikan kualitas air sungai; reformasi pemahaman keterkaitan antara gempa bumi, longsor, dan banjir; reformasi penanganan perubahan iklim; serta reformasi energi dalam sumber daya air

Kemudian pada bagian akhir, disampaikan *resume* terkait pada hal pemeliharaan, filosofi teknologi ramah lingkungan, dan reformasi pengelolaan sumberdaya air. **[Rochmad Budi Santoso, 2019]**

Judul Buku	:	Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Penulis	:	Agus Maryono
Penerbit	:	Gadjah Mada University Press